
Cerpen Saran "Groot Majoor" Prakoso

Karya Y.B. Mangunwijaya:

antara Hegemoni dan Resistensi

Sudibyo

1. Pengantar

Kegelisahan Y.B. Mangunwijaya mempertanyakan hal-hal yang dianggap mapan atau kanonik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pilihan sikapnya sebagai seorang sastrawan. Hal ini terlihat dalam sejumlah novel yang ditulisnya, seperti *Burung-Burung Manyar (BBM)*, *Rara Mendut (RM)*, *Genduk Duku (GD)*, *Lusi Lindri (LL)*, dan *Durga Umayi (DU)*.

Melalui *BBM*, Mangunwijaya menggugat stigmatisasi hitam-putih dan kuasanya terhadap nasib manusia. Di samping itu, ia juga mencoba menilai kembali cara-cara para penguasa Orde Baru yang membengkokkan penuturan sejarah revolusi Indonesia ke arah suatu tafsir bercorak fasistis dan berjiwa Machiavellian. *BBM* mempertanyakan apakah Indonesia masih menapak di jalan yang benar serta setia kepada arah haluan revolusi yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan keabsahan yang lazim ditarik antara kelompok Pandawa dengan Kurawa dengan perlambangan Bharatayuddha sehingga seolah-olah semua pelaku Indonesia adalah Pandawa dan semua Belanda beserta seluruh kaki tangan mereka adalah Kurawa (Mangunwijaya, 1997:57).

Padaحال, meskipun Teto menyeberang ke pihak Belanda dan menjadi tentara NICA serta menyimpan kebencian yang menggumpal terhadap tokoh-tokoh pejuang Indonesia, ia tidak harus lebih hina jika dibandingkan dengan pejuang yang mengaku berjiwa republiken bernama Setan Koper yang pekerjaannya merampok, menjarah, dan memperkosa dengan dalih revolusi. Polarisasi penokohan Teto yang NICA (Kurawa) dengan Atik

yang republiken tulen (Pandawa) tidak harus dilihat sebagai dikotomi, tetapi bisa diinterpretasikan sebagai biner. Biner Pandawa-Kurawa merupakan analogi bagi perang pada umumnya: andaikata tidak ada Kurawa, tidak akan ada musuh bagi Pandawa dan sebagaimana diketahui dalam perang, suatu pihak berarti apabila ada pihak yang dianggap sebagai musuh (lihat Allen, 1996:105). Dari sini, sikap Teto dapat disamakan dengan Karna yang memilih berdiri di pihak Kurawa karena membela suara hati nuraninya. Meskipun kenyataannya Karna berperang melawan Pandawa, batinnya tidak pernah memusuhi para Pandawa. Karna berperang semata-mata hanya menuruti kehendak hati nuraninya. Demikian pula halnya dengan Teto, meskipun secara lahiriah berseberangan dengan Atik, ia tidak pernah menganggap Atik sebagai musuh. Berdasar pada hal ini, Mangunwijaya menolak stigmatisasi hitam-putih, Pandawa-Kurawa, NICA-KNIL, Belanda-Republik Indonesia dalam narasi sejarah revolusi Indonesia. Semuanya harus ditimbang dan dinilai kembali secara objektif dan proporsional.

Pertanyaan politis tentang tanah air Ibu Pertiwi diungkapkan secara lebih tajam dalam *DU*. *DU* merupakan suatu pelukisan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kolonial ketika masih disebut Insulinde (Sulinda, lin) kemudian menjadi Pertiwi, sampai menjadi sosok yang tidak jelas lagi identitasnya, yang dipersonifikasikan sebagai pelacur multinasional tingkat tinggi (Madame Nussy de Progueleaux) yang membangun proyek-proyek sumber sengsara bagi saudara kembar-dampitnya, rakyat biasa (Brojol).

Bagi massa rakyat, Ibu Pertiwi, di satu sisi, adalah Dewi Umayi yang cantik dan berbudi mulia, tetapi di sisi lain ia adalah Durga yang berwajah demonik, yang bengis, dan kejam (Mangunwijaya, 1997:57). Dalam *DU*, Ibu Pertiwi lebih sering menampilkan wajah demoniknya daripada wajah bidadarinya.

Apabila dibaca sebagai dekonstruksi sejarah Indonesia mutakhir, *DU* secara keseluruhan dapat dianggap sebagai parodi atau sebagai perspektif alternatif terhadap pendirian bangsa Indonesia mengenai *grande histoire* (sejarah besar) dan *petite histoire* (sejarah kecil). Misalnya, ketokohan Soekarno dideskripsikan lengkap dengan keadaan kamar mandi dan WC-nya, sedangkan cerita mengenai diri Sutomo disajikan dengan ejekan-ejekan sehubungan dengan ukuran badannya (Allen, 1996:112). Cerita lain adalah peran Madame Nussy yang notabene adalah pelacur multinasional dalam melobi berbagai pihak di luar negeri untuk mendukung revolusi Indonesia. Hampir pasti bahwa sejarah versi *DU* berbeda dengan versi sejarah umum yang diukur para sejarawan berdasarkan kanon-kanon tertentu. Di sini, kita dihadapkan pada kanon dan bukan kanon, *grande histoire* dengan *petite histoire*. Tampak bahwa *DU* didesain secara sengaja untuk menimbang dan menilai kembali apa yang disebut *grande histoire* dan *petite histoire*. Benarkah bahwa *grande histoire* lebih penting dan lebih mulia jika dibandingkan dengan *petite histoire*?

Trilogi *RM*, *GD*, dan *LL* menokohkan figur perempuan yang dalam wacana kekuasaan selalu dipinggirkan. Untuk itu, sosok perempuan yang ditampilkan dalam trilogi ini adalah bukan perempuan ningrat, melainkan perempuan biasa, pekerja praktis dan pejuang ulung yang luar biasa bagi anak-anak mereka (Mangunwijaya, 1997:57). Melalui trilogi *RM*, *GD*, dan *LL*, Mangunwijaya menggugat *grande histoire* yang selalu berpihak pada laki-laki dan memarjinalkan peran perempuan. *RM*, *GD*, dan *LL* mengungkapkan bahwa jika memperoleh ruang dan kesempatan yang sama, perempuan bisa lebih tangguh daripada laki-laki. Perempuan bisa juga bersifat kuat, pemberon-

tak, dan agak mengancam, baik terhadap perempuan yang lain maupun terhadap laki-laki.

Berangkat dari etos kepengarangan yang senantiasa mempertanyakan kemapuan dan hal-hal yang bersifat kanonik sebagaimana dikemukakan di atas, Mangunwijaya menulis cerpen Saran "Groot Majoor" Prakoso. Cerpen ini selesai ditulis pada 10 Mei 1998, sebelas hari menjelang turunnya Soeharto, tetapi baru dipublikasikan Kompas, 19 Juli 1998. Tampaknya hal ini berhubungan dengan pertimbangan redaksional karena cerpen Saran "Groot Majoor" Prakoso mencoba menggugat status quo dan dominasi rezim Soeharto.

Seandainya dapat dipublikasikan sebelum pengunduran diri Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia, cerpen Saran "Groot Majoor" Prakoso tentu akan tercatat sebagai salah satu karya sastra yang menggugat hegemoni pemerintah Soeharto ketika Soeharto masih berkuasa. Sesuatu yang jarang terjadi pada waktu itu.

Bertolak dari kenyataan bahwa cerpen Saran "Groot Majoor" Prakoso berupaya menggugat dominasi dan hegemoni suatu rezim, di dalam tulisan ini, dipergunakan teori hegemoni Gramsci sebagai alat analisis.

2. Landasan Teori

Dalam pandangan Gramsci, pengertian hegemoni bertolak dari dikotomi tradisional antara kekuatan dengan konsensus. Sehubungan dengan itu, Gramsci berpendapat bahwa supremasi kelompok atau kelas sosial hadir melalui dua hal yaitu dominasi atau penindasan serta kepemimpinan intelektual dan moral. Gramsci cenderung menempatkan konsep hegemoni sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Mekanisme kontrol sosialnya bersifat internal dengan membentuk keyakinan ke dalam norma yang berlaku, bukan melalui kontrol eksternal dengan menggunakan hukum dan ganjaran. Oleh sebab itu, hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan yang diperoleh melalui "konsensus" daripada penindasan suatu kelas sosial terhadap yang lain. Hal ini

dicapai melalui berbagai macam cara, antara lain melalui lembaga-lembaga masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dan afektif masyarakat. Dengan cara demikian orang digiring untuk menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Di samping itu, menurut Gramsci, superioritas ideologis juga harus memiliki akar-akar ekonomi yang kuat, bahkan jika hegemoni itu berupa etika politik, hegemoni harus juga bersifat ekonomis dan mempunyai landasan sebagai fungsi penentu sehingga kelompok yang sedang memimpin menjalankan aktivitas pokok ekonomis yang ditentukan (Hendarto, 1993:73-74).

Konsep hegemoni, lebih lanjut, hendak mewujudkan suatu hipotesis bahwa dalam tatanan sosial yang teratur harus ada dasar persetujuan yang kuat, yang dapat melawan kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, yang muncul dari perbedaan-perbedaan kepentingan. Konsensus dalam arti ini berada dalam hubungannya dengan objek-objek tertentu, pribadi, kepercayaan nilai-nilai, dan lembaga-lembaga. Dengan kata lain, dalam hegemoni, konsensus tampil sebagai komitmen aktif yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi tinggi yang ada adalah sah (Hendarto, 1993:81).

Bagi Gramsci, konsep hegemoni juga merupakan konsep penuntun bagi praktek berpolitik. Secara teoretis, ia membedakan perjuangan politik dengan konflik militer. Dalam perjuangan politik, strategi yang diterapkan adalah memberikan penetrasi terhadap mekanisme-mekanisme ideologis yang kompleks dengan menundukkan satu demi satu agen-agen masyarakat sipil seperti sekolah, media massa, kongsi-kongsi dagang, dan sebagainya, sedangkan dalam konflik militer kekuatan-kekuatan politik diarahkan untuk memperjuangkan kekuasaan negara (Hendarto, 1993:85).

Negara menurut Gramsci tidak hanya menyangkut aparat-aparat pemerintah, melainkan juga aparat-aparat hegemoni atau masyarakat sipil. Negara adalah kompleks menyeluruh aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis yang melaluinya ke-

las penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga berusaha memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya (Faruk, 1994:77).

Perluasan konsep negara itu merupakan akibat pementingan makna kebudayaan dalam teori Gramsci. Berdasarkan hal tersebut, Gramsci berbicara mengenai negara "etis" atau negara "kebudayaan". Negara dapat disebut sebagai negara etis apabila salah satu fungsi terpentingnya adalah untuk membangkitkan atau mengangkat massa penduduk yang besar pada level moral dan level kultural. Sekolah sebagai pengemban fungsi edukatif yang positif dan istana sebagai pendukung fungsi edukatif yang negatif dan represif merupakan aktivitas yang paling penting dalam pengertian ini. Namun, dalam praktek, sejumlah besar inisiatif dan aktivitas-aktivitas swasta pun mengarah ke arah yang sama, khususnya inisiatif dan aktivitas-aktivitas yang membentuk aparat-aparat hegemoni politik dan kultural kelas penguasa (Faruk, 1994:77).

Berangkat dari pengertian terakhir itu, negara dapat dianggap sebagai "edukator" apabila negara berkecenderungan menciptakan suatu tipe atau level kebudayaan baru. Hal itu tidak dilakukan secara spontan, tetapi secara terorganisasi melalui segala asosiasi politik beserta sindikatnya (Faruk, 1994:77).

Pemikiran Gramsci tentang hegemoni sebagaimana disebutkan di atas membuka dimensi baru dalam studi sosiologis mengenai kesusastaan. Kesusastaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai gejala kedua yang bergantung dan ditentukan oleh masyarakat kelas sebagai infrastrukturnya. Akan tetapi, kesusastaan dipahami sebagai kekuatan sosial, politik, dan kultural yang berdiri sendiri serta mempunyai sistem tersendiri, meskipun tidak terlepas dari infrastrukturnya (Faruk, 1994:78).

Dalam studi Tony Davies (via Faruk, 1994:83) yang berusaha menganalisis peran kesusastaan dalam lembaga pendidikan dan hubungannya dengan hegemoni kelas sosial yang dominan, mengemukakan bahwa fungsi kesusastaan adalah untuk mendidik massa agar tidak menjadi

radikal, kasar, tetapi berperasaan dan berpikiran halus serta anggun. Dalam hal ini, Davies melihat pentingnya konsep kesatuan dalam kesusastraan tidak hanya bersangkut-paut dengan kesusastraan itu sendiri, melainkan juga sekaligus sebagai alat untuk memecahkan krisis ideologis dan perjuangan kelas dengan cara membangun suatu citra mengenai kesatuan atau *gemeinschaft* yang organik.

Fungsi kesusastraan seperti itu dapat terlaksana dengan baik apabila peme-gang hegemoni dan yang terhegemoni terikat dalam konsensus yang tidak menonjolkan dominasi dan keinginan untuk melakukan penetrasi. Sebaliknya, jika hegemoni terkait dengan suatu sistem yang otoritarian dan monolitik, satura pun pada gilirannya akan melibatkan diri dalam perjuangan militan melawan hegemoni. Sas-tra, baik secara eksplisit maupun implisit, akan menolak represi dan pressure yang menyesakkan.

Dalam keadaan demikian, sastrawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap hati nurani akan berusaha membebaskan diri dari eksek moral dan politik bangsa yang mengkooptasinya. Ia akan melakukan apa yang disebut oleh Kartodirdjo (1994:146) sebagai asketisme intelektual. Asketisme intelektual adalah rasionalitas baru yang dapat mempertinggi kesadaran sehingga manusia mampu melakukan distansiasi serta bersikap kritis terhadap situasi dan, dengan demikian, ia dapat membebaskan diri dari segala keterikatan. Oleh sebab itu, rasionalitas baru itu dapat mengendalikan emosionalitas, mentransendensi konformitas dan segala dominasi sosial terhadap dirinya. Organisasi dan institusi hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Kepribadian serta identitas dapat dipertahankan berdasarkan otonomi, otentisitas, otoritas, dan integritas yang ada padanya. Berdasarkan kesadaran itu, mentalitas yang dibudidayakan adalah mentalitas yang mampu menyalurkan kekuatan rasional dan emosional secara terpadu sebagai moralitas yang penuh dengan sensibilitas terhadap tanggung jawab sosial dan kewajiban moral dalam menghayati kewargaannya.

Berangkat dari kerangka berpikir di atas, tulisan ini membicarakan cerpen "Saran Groot Majoor Prakoso" karya Y.B. Mangunwijaya, Kompas, 19 Juli 1988.

3. Cerpen Saran "Groot Majoor" Prakoso: Hegemoni dan Resistensi

Cerpen Saran "Groot Majoor" Prakoso (selanjutnya disebut "SGMP") terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berkisah tentang hiruk-pikuk demonstrasi mahasiswa menuntut turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tokoh cerita adalah dua orang mahasiswa pegiat demokrasi dari kelompok PRD dan SMID bernama Kunta dan Bagio serta seorang laki-laki tua yang disebut Simbah. Ceritanya, Kunta dan Bagio yang tengah dikejar-kejar aparat keamanan dan menjadi korban sergapan gas air mata diselamatkan oleh tokoh Simbah. Di rumah Simbah, Kunta dan Bagio terlibat diskusi yang cerdas dengan Simbah seputar motivasi dan tujuan gerakan mahasiswa. Kunta mengemukakan bahwa gerakan mereka hanyalah gerakan moral. Menurut dia, para politisi dan para pakarlah yang berkewajiban merumuskan konsep kelanjutan perjuangan para mahasiswa. Berbeda dengan Kunta, Bagio yang tampak lebih pintar menyatakan bahwa mereka menuntut dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR/DPR. Pernyataan Bagio ini serta merta ditentang oleh Simbah. Menurut Simbah, tidak ada gunanya dilaksanakan Sidang Istimewa karena MPR/DPR telah disesaki beo, bunglon, dan Togog. Dikhawatirkan lembaga semacam itu hanya akan melahirkan keputusan bermacam-macam, yang kesemuanya aneh-aneh. Mendengar argumentasi Simbah, buru-buru Bagio menambahkan bahwa yang diinginkannya adalah segala sesuatunya berjalan konstitusional.

Kami juga punya konsep, jangan mengira. Yang jelas kami menuntut Sidang Istimewa MPR/DPR. Untuk apa MPR/DPR kebak beo bunglon Togog disuruh bersidang istimewa. Nanti super istimewa juga mutu Togognya mengarang macam-macam keputusan aneh-aneh Maksudnya begini Mbah, kita harus lewat jalan konstitusional. Konstitusional yes.

Anarki no. Maaf Pak, sebetulnya apa sih yang dimaksud Togog itu? Uah mosok belum tahu ... Drs. Togog ... menghamba pada macam-macam dan sembarangan orang, tetapi selalu saja orang yang dipilihnya itu lalim (koruptor, kolusi, nepotis) ... Togog ... tak kenal kesetiaan. Itu Togog, figur konyol serakah dan plin-plan.

Simbah yang tidak sependapat dengan pikiran Bagio yang sok konstitusional lantas menceritakan kisahnya ketika masih muda bersama dengan kedua orang temannya mengajak Groot Majoor Prakoso, seorang perwira menengah tamatan Akademi Militer Belanda agar mau menyusun kekuatan militer republik yang andal, setelah KNIL dan Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh Stachouwer menyerah secara resmi kepada panglima tentara ke-8 Jepang, Jenderal Yamashita. Namun, Prakoso menjawab bahwa untuk merdeka diperlukan jalan yang konstitusional. Jawaban Prakoso ini sangat menggusarkan dan tidak memuaskan hati Simbah yang berpikiran bahwa zaman itu adalah zaman revolusi dan de facto kekuasaan Belanda adalah nol besar.

Wel, kata tuan besar Prakoso, wel, je moet weten ..., segala keputusan besar arus ditentukan dalam parlemen di Holland sana. Aldus, logisch en redelijk ..., ini nanti musti arus ada suatu Sidang Istimewa Parlemen, beqrijp je ...?

Cerita Simbah mengenai Groot Majoor Prakoso yang merupakan bagian kedua "SGMP" analog dengan argumentasi Bagio ketika ditanya Simbah mengenai arah aksi mahasiswa pasca turunnya Soeharto. Simbah yang berpikir sangat realistis tidak bisa menerima jalur legal-konstitusional, baik yang ditawarkan oleh Prakoso maupun yang dikemukakan oleh Bagio. Simbah tidak bisa mempercayai lembaga legislatif produk pemerintah yang hegemonik, bahkan terhadap MPR/DPR ia berkomentar bahwa lembaga-lembaga itu sudah dipenuhi beo, bunglon, dan Togog sehingga pribadi-pribadi yang ada di dalamnya pun bermental submisif, oportunistis, dan permisif.

Sebagaimana kita ketahui bersama, selama tiga puluh dua tahun rezim Orde

Baru berkuasa terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Selama itu pula, terjadi akumulasi kekuasaan diikuti dengan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terjadi secara sistematis tanpa ada kontrol yang berarti dari lembaga perwakilan rakyat. Citra eksekutif yang demikian kuat ini meninggalkan kesan bahwa pemerintah tidak mungkin berbuat salah. Citra ini tercermin dalam tingkah laku aparat pemerintah yang kehilangan toleransi terhadap kritik dari rakyat, khususnya kritik yang ditujukan terhadap kebijakan pemerintah. Kritik boleh disampaikan sejauh kritik itu membangun dan tidak merusak harmoni karena kebajikan tertinggi adalah terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Dunia yang diciptakan adalah dunia yang rapi dan teratur. Semua bagian berada dalam tempatnya dan sesuai dengan fungsi serta hierarkinya. Dunia seperti ini bukan saja antikonflik dan menganggap konflik adalah sebuah penyimpangan yang tidak sepatutnya, melainkan juga menghindarkan diri dari pengetahuan tentang konflik. Meskipun dalam realitas keseharian konflik sosial bisa terjadi dan bahkan tampil dalam wajah yang keras, sebab-sebab harus dicari pada hubungan pribadi yang tidak harmonis dan adanya rekayasa oleh kekuatan jahat yang bermain di belakang layar. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila konsolidasi kekuasaan harus selalu dilakukan, bukan hanya demi kekuasaan itu sendiri, melainkan juga demi terjaganya keutuhan dunia yang serba seimbang, selaras, dan serasi (Abdullah, 1997:14).

Di dalam sistem seperti ini, pendapat politik yang berbeda dilokalisasi, digiring masuk dalam kategori subversif (Langenberg, 1996:241). Sebagai akibat, muncul represi dan intimidasi secara terencana atas nama negara, nasionalisme, pembangunan negara, dan sebagainya. Inilah inti dari apa yang disebut sebagai "*the psychology of fear*", yakni rakyat harus menerima kenyataan yang ada (Soetrisno, 1995:55).

Dalam situasi seperti ini, demokratisasi hadir sebagai retorika belaka. Demokratisasi tidak berada dalam ruang yang selayaknya karena ruang itu penuh de-

Anarki no. Maaf Pak, sebetulnya apa sih yang dimaksud Togog itu? Uah mosok belum tahu ... Drs. Togog ... menghamba pada macam-macam dan sembarangan orang, tetapi selalu saja orang yang dipilihnya itu lalim (koruptor, kolusi, nepotis) ... Togog ... tak kenal kesetiaan. Itu Togog, figur konyol serakah dan plin-plan.

Simbah yang tidak sependapat dengan pikiran Bagio yang sok konstitusional lantas menceritakan kisahnya ketika masih muda bersama dengan kedua orang temannya mengajak Groot Majoor Prakoso, seorang perwira menengah tamatan Akademi Militer Belanda agar mau menyusun kekuatan militer republik yang andal, setelah KNIL dan Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh Stachouwer menyerah secara resmi kepada panglima tentara ke-8 Jepang, Jenderal Yamashita. Namun, Prakoso menjawab bahwa untuk merdeka diperlukan jalan yang konstitusional. Jawaban Prakoso ini sangat menggusarkan dan tidak memuaskan hati Simbah yang berpikiran bahwa zaman itu adalah zaman revolusi dan de facto kekuasaan Belanda adalah nol besar.

Wel, kata tuan besar Prakoso, wel, je moet weten ..., segala keputusan besar arus ditentukan dalam parlemen di Holland sana. Aldus, logisch en redelijk ..., ini nanti musti arus ada suatu Sidang Istimewa Parlemen, beqrijp je ...?

Cerita Simbah mengenai Groot Majoor Prakoso yang merupakan bagian kedua "SGMP" analog dengan argumentasi Bagio ketika ditanya Simbah mengenai arah aksi mahasiswa pasca turunnya Soeharto. Simbah yang berpikir sangat realistis tidak bisa menerima jalur legal-konstitusional, baik yang ditawarkan oleh Prakoso maupun yang dikemukakan oleh Bagio. Simbah tidak bisa mempercayai lembaga legislatif produk pemerintah yang hegemonik, bahkan terhadap MPR/DPR ia berkomentar bahwa lembaga-lembaga itu sudah dipenuhi beo, bunglon, dan Togog sehingga pribadi-pribadi yang ada di dalamnya pun bemental submisif, oportunistis, dan permisif.

Sebagaimana kita ketahui bersama, selama tiga puluh dua tahun rezim Orde

Baru berkuasa terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Selama itu pula, terjadi akumulasi kekuasaan diikuti dengan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terjadi secara sistematis tanpa ada kontrol yang berarti dari lembaga perwakilan rakyat. Citra eksekutif yang demikian kuat ini meninggalkan kesan bahwa pemerintah tidak mungkin berbuat salah. Citra ini tercermin dalam tingkah laku aparat pemerintah yang kehilangan toleransi terhadap kritik dari rakyat, khususnya kritik yang ditujukan terhadap kebijakan pemerintah. Kritik boleh disampaikan sejauh kritik itu membangun dan tidak merusak harmoni karena kebajikan tertinggi adalah terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Dunia yang diciptakan adalah dunia yang rapi dan teratur. Semua bagian berada dalam tempatnya dan sesuai dengan fungsi serta hierarkinya. Dunia seperti ini bukan saja antikonflik dan menganggap konflik adalah sebuah penyimpangan yang tidak sepatutnya, melainkan juga menghindarkan diri dari pengetahuan tentang konflik. Meskipun dalam realitas keseharian konflik sosial bisa terjadi dan bahkan tampil dalam wajah yang keras, sebab-sebab harus dicari pada hubungan pribadi yang tidak harmonis dan adanya rekayasa oleh kekuatan jahat yang bermain di belakang layar. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila konsolidasi kekuasaan harus selalu dilakukan, bukan hanya demi kekuasaan itu sendiri, melainkan juga demi terjaganya keutuhan dunia yang serba seimbang, selaras, dan serasi (Abdullah, 1997:14).

Di dalam sistem seperti ini, pendapat politik yang berbeda dilokalisasi, digiring masuk dalam kategori subversif (Langenberg, 1996:241). Sebagai akibat, muncul represi dan intimidasi secara terencana atas nama negara, nasionalisme, pembangunan negara, dan sebagainya. Inilah inti dari apa yang disebut sebagai "the psychology of fear", yakni rakyat harus menerima kenyataan yang ada (Soetrisno, 1995:55).

Dalam situasi seperti ini, demokratisasi hadir sebagai retorika belaka. Demokratisasi tidak berada dalam ruang yang selayaknya karena ruang itu penuh de-

ngan polusi kekuasaan. Korupsi, kolusi, monopoli, nepotisme, dan kekuasaan represif merupakan unsur-unsur polusi tersebut. Dengan sangat jelas, korupsi, kolusi, monopoli, nepotisme, dan kekuasaan represif telah menghisap segala kemungkinan bagi demokrasi untuk eksis. Akibatnya, sistem kepemimpinan Orde Baru sangat rapuh karena hanya bertumpu pada mitos-mitos seperti pengabdian, loyalitas, kesabaran, stabilitas, keadilan sosial, dan sebagainya yang pada gilirannya justru menjadi bumerang karena sangat represif dan tidak menjadikan masyarakat berperan secara partisipatif (Awuy, 1998).

Lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya melakukan kontrol terhadap eksekutif tidak banyak berperan karena sistem perekrutan anggota lembaga-lembaga tersebut selalu diwarnai intervensi kekuasaan eksekutif. Seseorang dapat dipilih atau diangkat sebagai anggota lembaga-lembaga tersebut lebih banyak ditentukan oleh restu kekuasaan eksekutif, bukan karena pilihan masyarakat. Oleh sebab itu, tidak aneh jika ada yang menyebut DPR sebagai Dewan Perwakilan Rezim dan MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rezim. Peran kedua lembaga ini sebagai kepanjangan tangan rezim terbukti secara nyata dalam setiap kesempatan. Meskipun Soeharto telah berkuasa lebih dari tiga puluh tahun dan rakyat telah jenuh dengan segala jenis penyimpangan yang dilakukannya, MPR secara bulat sepakat menetapkan kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk yang kesekian kalinya. Keputusan ini diambil setelah konon MPR meneliti kehendak rakyat, yang selalu dijadikan dalih oleh Soeharto melegitimasi kesediaannya sebagai calon presiden, yang masih menginginkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Akan tetapi, ketika Soeharto dikukuhkan secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya pada 11 Maret 1998, ribuan mahasiswa hampir di seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa menyambut keputusan MPR itu. Di salah satu kota, pada hari yang sama, bahkan berlangsung demonstrasi besar yang melibatkan 30.000 mahasiswa

wa diakhiri dengan drama pembakaran boneka besar sebagai simbol diri Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi seperti ini terus berlangsung di seluruh Indonesia, menuntut pengunduran diri Soeharto. Karena terus didesak dan ditekan oleh mahasiswa, Soeharto pun membuat pernyataan bahwa ia bersedia mundur apabila dikehendaki rakyat yang direpresentasikan oleh MPR. Di sini terjadi disinformasi sebab Soeharto tahu persis bahwa anggota MPR yang hampir seluruhnya naik berkat restunya tentu tidak akan mendesaknya turun dari jabatan. Gelagat ini diketahui oleh mahasiswa. Mereka pun semakin memperhebat desakannya. Puncaknya, mereka berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Mereka mendesak ketua DPR/MPR yang notebene adalah pembantu setia Soeharto, untuk meminta Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Oleh karena realitas politik sudah tidak memberikan ruang bagi Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya, dengan berat hati ketua DPR/MPR menyampaikan tuntutan para mahasiswa kepada Soeharto. Meskipun demikian, Soeharto tidak menyerah begitu saja. Melalui pembantu setianya yang lain, ia mengatakan bahwa tuntutan ketua DPR/MPR itu tidak menceminkan aspirasi seluruh anggota DPR/MPR dan menganggap bahwa tuntutan itu merupakan tanggung jawab pribadi ketua DPR/MPR. Baru, setelah sebagian besar menteri anggota kabinet yang dikenal dekat dengannya tidak mau bergabung dengan kabinet reformasi yang akan dibentuknya, Soeharto bersedia mengundurkan diri. Dengan demikian, berakhirlah sebuah sistem pemerintahan yang hegemonik dan dominan yang selama tiga puluh tahun lebih melakukan represi dan pressure.

Peristiwa suksesi di atas sekaligus merupakan lembaran hitam bagi DPR/MPR. MPR yang baru dua bulan sebelumnya sepakat secara bulat menetapkan Soeharto sebagai presiden, dengan dalih telah meneliti kehendak rakyat Indonesia, pada saat itu harus menarik kembali mandat yang telah diberikan kepada Soeharto. Padahal, secara formal, Soeharto beserta para menteri anggota kabinet bentukannya nyaris belum berbuat apa-

apa. Hal ini mengindikasikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak menjelmakan kedaulatan rakyat. Tentu saja, seluruh rakyat Indonesia pun menyimpan kekecewaan yang teramat dalam terhadap MPR.

Oleh karena itu, cukup beralasan, jika tokoh Simbah dalam "SGMP" merasa heran ketika Kunta dan Bagio, pada saat-saat khaotik menuntut turunnya Soeharto masih mempercayai Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai juru selamat dan tidak menyadari disinformasi yang disebarkan oleh Soeharto tentang asas legal konstitusional. Bagi Simbah, MPR yang telah dipenuhi beo, bunglon, dan Togog itu tidak perlu lagi dipercaya. Simbah yang pernah mempunyai pengalaman serupa dengan Groot Majoor Prakoso pasca penyerahan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan Jepang tidak bisa memahami jika Kunta dan Bagio tetap menghendaki suksesi yang konstitusional karena tidak mau dianggap anarkis. Untuk itu, Simbah pun menceritakan kisah Groot Majoor Prakoso sebagaimana tersebut di atas. Ternyata, Kunta yang aktivis PRD dan SMID serta Bagio yang cukup kritis tidak mampu menarik benang merah antara pendirian yang diyakininya dengan sikap Prakoso.

Kakek berhenti bercerita. Di luar rupanya gedebug-gedebug revolusi sudah berhenti. Si Kun bernapas panjang. "Ya, tapi hubungannya apa dengan Majoor Prakoso kolonial itu dengan masalah kita sekarang, Mbah?" tanya si kemenakan, mengernyit dua mata disipitkan. Sang kakek tersenyum....

Sebenarnya, Simbah sebagai penyambung lidah Mangunwijaya ingin mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu sejarah bukan golongan konformis yang berhasil membawa perubahan. Meskipun mereka kadangkala bersikap progresif, revolusioner, sedikit banyak mereka sudah tertanjur mapan dalam suasana status quo. Oleh sebab itu, wajar jika jumlah golongan ko lebih besar daripada golongan nonko karena golongan nonko selalu menjadi perintis atau ujung tombak yang memerlukan keberanian dan jiwa pengorbanan yang luar biasa. Jika golongan ko biasanya dinilai seim-

bang, bijaksana, realis, pantas diajak dialog, dan mudah diterima, golongan nonko lazimnya dianggap ekstrem, kurang perhitungan, tidak rasional, merepotkan, membahayakan, dan sebagainya. Akan tetapi, terhadap mereka sejarah lebih objektif, penuh pemahaman, dan penghargaan. Dalam krisis pancaroba perubahan sejarah besar, justru kaum nonkolah yang praktis menjadi pembuat keputusan, juru selamat, pahlawan, dan pandu sejarah (Mangunwijaya, 1998). Sehubungan dengan itu, meskipun tidak tersurat secara tekstual, melalui amsal cerita mengenai Groot Majoor Prakoso, Simbah hendak menasihati Kunta dan Bagio sebagai representasi aktivis gerakan mahasiswa agar tidak terbius asas legal konstitusional yang pada hakikatnya hanya akan memantapkan keadaan status quo dan dapat mengandaskan cita-cita menuju perubahan.

Melalui dialognya dengan Kunta dan Bagio serta amsal cerita Groot Majoor Prakoso, Simbah sekaligus hendak menyatakan penolakannya terhadap dominasi dan hegemoni serta ajakannya untuk membangun resistensi kultural. Kedua hal ini merupakan perwujudan asketisme intelektual Mangunwijaya yang tetap setia mengawal hati nurani. Ini dibuktikan dengan keteguhannya melontarkan gagasan kritis dan cenderung menentang arus dalam memahami proses suksesi. Baginya, suksesi adalah sesuatu yang harus terjadi. Pendirian ini bertolak belakang dengan pendirian golongan konformis yang masih menginginkan keadaan status quo dan berpendapat bahwa suksesi kepala pemerintahan sangat riskan. Di samping itu, melalui tokoh Simbah, ia juga hendak mengungkapkan bahwa aktivitas-aktivitas mahasiswa menuntut Soeharto turun bukanlah tindakan anarki. Aktivitas-aktivitas semacam itu adalah kodrat yang akan dan harus terjadi manakala terjadi kecurangan-kecurangan dan represi yang menekan. Meskipun demikian, harus diingat bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan hendaknya juga berangkat dari suatu konsep yang jelas tentang apa yang dituntutnya melalui demonstrasi. Tanpa visi dan misi yang konseptual, mahasiswa akan mudah diom-

bang-ambingkan oleh para oportunist politik dan terjebak oleh berbagai disinformasi yang sengaja dihembus-hembuskan oleh pihak-pihak yang tetap hendak melanggengkan status quo.

Sebagaimana terlihat dalam "SGMP", ajakan Simbah kepada Bagio dan Kunta untuk mencermati kisah Groot Majoor Prakoso adalah ajakan Mangunwijaya untuk mewaspadaikan disinformasi yang dihembus-hembuskan oleh Soeharto dan rezim yang mendukungnya. Mahasiswa seharusnya tanggap dan bersikap kritis terhadap upaya-upaya mereka, tidak seperti Kunta dan Bagio yang secara tidak sadar justru terjebak oleh propaganda rezim ini yang akan memanipulasi asas legal konstitusional untuk melanggengkan kekuasaannya. Mangunwijaya, secara terang-terangan, menolak MPR sebagai representasi pemegang kedaulatan rakyat tertinggi karena lembaga ini telah dipenuhi oleh pribadi-pribadi bermental beo, bunglon, dan Togog (submisif, oportunist, dan permisif). Bagaimana bisa MPR yang telah didominasi anggota-anggota berkepribadian demikian dan dikukuhkan sebagai anggota MPR berkat perkenan dan restu Soeharto menyuarakan hati nurani rakyat?

4. Simpulan

Dari pembahasan di atas tampak bahwa Mangunwijaya secara konsisten melakukan asketisme intelektual. Ia mampu menciptakan distansiasi serta bersikap kritis terhadap situasi. Ia pun dapat membebaskan diri dari segala keterikatan, mentransendensi konformitas, serta segala dominasi sosial terhadap dirinya. Kemampuan dan kesadaran itu, memperkuat sensibilitasnya terhadap kewajiban moral dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, sebagai seorang sastrawan, ia turut berpartisipasi dalam transformasi dan perubahan sosial, politik, serta kebudayaan bukan sebagai agen negara melainkan sebagai representasi rakyat kecil atau golongan yang tersisihkan. Sebagai intelektual yang cenderung oposisionis, ia melibatkan diri dalam perjuangan melawan hegemoni dengan menciptakan hegemoni alternatif

berupa pesan-pesan moral untuk menghadapi kekuasaan yang otoritarian dan monolitik. Pilihan sikapnya yang nonkonformis itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menumbangkan pemerintahan yang dominan dan hegemonik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1997. "Akar Budaya Feodalisme". *Ulumul Qur'an*, No. 4/VII/1997.
- Allen, Pamela. 1996. "Pencitraan dan Kebangsaan dalam Tiga Roman Mangunwijaya". *Kalam*, No. 8, 1996.
- Awuy, Tommy F. 1998. "Saatnya Demokrasi Bernapas". *Kompas*, 28 Juli 1998.
- Faruk, 1994. *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foulcher, Keith. 1997. "Konstruksi Kebudayaan Nasional Indonesia: Pola-pola Hegemoni dan Resistensi," dalam Idi Subandy Ibrahim (ed.). *Ecstasy Gaya Hidup*. Bandung: Mizan.
- Hendarto, Heru. 1993. "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", dalam Tim Redaksi Driyarkara (ed.). *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1994. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Langenberg, Michael van. 1996. "Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (eds.). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Pangung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Mangunwijaya, Y.B. 1981. *Burung-Burung Manyar*. Jakarta: Djembatan.
- . 1983. *Roro Mendut*. Jakarta: Gramedia.
- . 1987. *Genduk Duku*. Jakarta: Gramedia.

- . 1987. *Lusi Lindri*. Jakarta: Gra-media.
- . 1991. *Durga Umayi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- . 1997. "Novel Saya dan Lakon Wayang", *Kalam*, Edisi 9, 1997.
- . 1998. "Evolusi-Revolusi", *Kompas*, 30 April 1998.
- . 1998. *Saran "Groot Majoor" Prakoso*, *Kompas*, 19 Juli 1998.
- Sutrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kani-sius.